

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan Northern Territory Australia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia*. Perbandingan tersebut menghasilkan persamaan dan perbedaan, serta kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan pelajaran terbaik yang bisa didapatkan oleh Indonesia dari pengaturan pemidanaan penyalahgunaan narkoba di Australia.

Penelitian hukum ini menggunakan penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia* sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal online tentang modifikasi, pidana dan pemidanaan serta penyalahgunaan narkoba, dan kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan *Black's Law Dictionar* sebagai bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dan penelusuran online dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Bahwa baik Indonesia ataupun Australia (Northern Territory) memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pengaturan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yaitu Australia telah merumuskan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan Indonesia yaitu sanksi berupa pidana denda. Australia juga telah merumuskan modifikasi pidana berupa sanksi administratif sebagai pengganti pidana denda apabila pidana denda tidak dibayarkan. Sedangkan kekurangannya terletak pada tidak merumuskan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyaknya kelebihan pengaturan di Australia terdapat Best Practice yang dapat diadopsi yaitu adanya modifikasi pidana apabila pidana denda tidak dibayarkan.

Kata Kunci: Kajian Komparasi, Modifikasi Pidana, Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

This legal research aims to determine the comparison of punishment in the crime of narcotics abuse based on legislation in Indonesia and the Northern Territory of Australia, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia. The comparison produces similarities and differences, as well as the advantages and disadvantages of each legislation. In addition, this research also yields the best lessons that can be obtained by Indonesia from the criminal regulation of drug abuse in Australia.

This legal research uses normative legal writing with statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. The legal material used is the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia as primary legal materials, secondary legal materials in the form of text books, online journals on modification, crime and punishment as well as narcotics abusers, and legal dictionaries, English-Indonesian dictionaries and Black's Law Dictionary as tertiary legal material. The technique of collecting legal materials is in the form of library research and online searches using a qualitative descriptive method and a deductive conclusion method.

That both Indonesia and Australia (Northern Territory) have advantages and disadvantages. The advantage of setting punishment for drug abuse in Indonesia is that Australia has formulated lighter criminal sanctions than Indonesia, namely sanctions in the form of fines. Australia has also formulated a criminal modification in the form of administrative sanctions as a substitute for fines if the fines are not paid. Meanwhile, the weakness lies in not formulating rehabilitation for narcotics abuse. The many advantages of regulation in Australia are that there is a Best Practice that can be adopted, namely that there is a modification of the penalty if the fine is not paid.

Keywords: *Comparative Study, Criminal Modification, misuse of drugs*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.Keaslian Penelitian	9
1.6.Metode Peneltian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA, PEMIDANAAN DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	17
2.1 Ruang Lingkup Pidana dan Pidanaan	17
2.1.1 Pengertian Pidana dan Pidanaan	17
2.2 Macam-Macam Sistem Hukum	34
2.3 Tindak Pidana Narkotika	38
2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	38
2.3.2 Jenis Narkotika dan Golongannya	40
2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG MODIFIKASI PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA	47
3.1 Pengaturan Pidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Dan <i>Northern Territory</i> Australia	47
3.1.1 Jenis Sistem Hukum Di Indonesia Dan Australia	47
3.1.2 Pengaturan Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	53
3.1.3 Pengaturan Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Di <i>Northern Territory</i> Australia Menurut <i>Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia</i>	59
3.2 <i>Best Practices</i> Pengaturan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di <i>Northern Territory</i> Australia.....	69
3.2.1 Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Pengaturan Pidanaan Dalam Legislasi Di Indonesia dan <i>Northern Territory</i> Australia	69
3.2.2 <i>Best Practices</i> Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pengaturan Di <i>Northern Territory</i> Australia Bagi Indonesia.....	78
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89
Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	90
Lampiran 2 <i>Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia</i>	102

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Keaslian Penelitian Dan Pembedanya.
- Tabel 2 Perbedaan Karakteristik Sistem Hukum *Civil Law* dan Sistem Hukum *Common Law*.
- Tabel 3 Ketentuan Pidanaan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Menurut Undang-Undang Narkotika.
- Tabel 4 Persamaan Pengaturan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Antara Indonesia Dan Australia.
- Tabel 5 Perbedaan Pengaturan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Antara Indonesia Dan Australia.
- Tabel 6 Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Tabel 7 Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di *Northern Territory* Australia Berdasarkan *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia*.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
 Tentang Narkotika
- Lampiran 2 *Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia*